

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ANGGA PARAMITRA
NPM. 0671010015

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA

2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : ” PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA ”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadek I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Drs. EC Gendut Soekarno, MS selaku Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Bapak Fauzul Aliwarman S.Hi, M.Hum selaku pengganti sementara Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bu Mas Anienda TF., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Sariyanto S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bu Hj. Dedeh Suryanti S.H selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
9. Seluruh Pegawai Pengadilan yang berada di Ruang Kearsipan di Pengadilan Negeri Surabaya terutama buat Bu Elly S.H, Bu Aris S.H, dan Bapak Widodo, terimakasih atas bantuannya, serta pegawai lainnya yang turut membantu yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapakku Sugianto dan Ibuku Tri Para Iriyanti atas dukungan moril dan materiil serta doa penuh kasih sayang dan juga buat kakak ku Argo, S.H yang menjadi pemberi dorongan terbesar untuk terselesaikan proposal skripsi ini.
11. Buat kekasihku tercinta ”Yhohana Kusuma Wardani, STP” yang telah memberikan semangat dan cintanya buat penulis.

12. Teman-teman seperjuangan dan seluruh Mahasiswa/i angkatan 2006 ; Yudi, Wisma, Helmi dan seluruh angkatan 2007 ; Andri, Jay, Dany, Fery, Fakultas Hukum dan my best friends Yusman, Novan, Hendrik, Adi serta teman-teman dari UKM Tennis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.5.1 Pengertian Narkotika.....	8
1.5.2 Penggolongan Narkotika.....	10
1.5.3 Pengertian Psikotropika	13
1.5.4 Penggolongan Psikotropika	15
1.5.6 Pengertian Anak	17
1.5.6.1 Pengertian Anak menurut UU nomor 3 tahun 1997.	18

1.5.6.2 Pengertian Anak menurut UU nomor 23 tahun 2002	18
1.5.7 Proses Pemeriksaan.....	19
1.5.8 Upaya Hukum	19
1.6 Metodologi Penelitian	22
1.6.1 Jenis Penelitian.....	22
1.6.2 Sumber Data	22
1.6.2.1 Data Primer.....	23
1.6.2.2 Data Sekunder.....	23
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	23
1.6.3.1 Penelitian Kepustakaan.....	24
1.6.3.1 Wawancara	24
1.6.4 Analisis Data	24
1.7 Sistematika Penulisan	25
1.8 Lokasi Penelitian	26
BAB II PEMERIKSAAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK	
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	27
2.1 Konsep Diversi dan Restorative Justice yang Dipergunakan Di PN	
Surabaya	27
2.1.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	
dan Psikotropika.....	33
2.1.2 Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh	
Anak.....	39

2.2 Proses Pemeriksaan Perkara terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan

Narkotika dan Psikotropika di PN Surabaya..... 42

BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PN SURABAYA..... 46

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika 46

3.2 Analisis Vonis Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika dan Psikotropika..... 54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 60

4.2. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Surat Ijin Penelitian.
2. Lembar Wawancara.
3. Lembar Jawaban

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Angga Paramitra
NPM : 0671010015
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 30 November 1986
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan perkara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu Menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika hakim harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan perlindungan anak dalam proses peradilan. Dan sanksi hukuman yang dipergunakan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Kejahatan Narkoba dan Psikotropika.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai¹.

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai sarana utama. Sumber daya manusia hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa dilandasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dapat menjadikan modal dalam berkompetisi di era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Adapun yang dimaksud narkoba menurut

¹ Dirjen Dikti Depdikbud, Bahan Penataran dan Referensi Penataran, Jakarta, 1993, hal 200

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tentang psikotropika itu sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 1 angka 1 :

Psikotropika adalah obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Narkotika dan Psikotropika apabila dipergunakan secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat². Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan tindakan suatu kejahatan dan mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan

² Suhasril, Tindak Pidana Narkotika, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal 89

juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.³ Upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit untuk menghindarkan narkotika dan psikotropika dari kalangan remaja maupun dewasa. Telah dibentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakorlak Inpres). No 6 tahun 1971 yang bertugas yang menentukan kebijaksanaan dan mengkoordinasi segenap upaya bidang penggolongan masalah lalu lintas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya disamping masalah kenakalan remaja lainnya.⁴

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

³ Ibid, hal 49

⁴ Pramuka Saka Bhayangkara, Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta, Bina Darma Pemuda, 1997, Hal 147

Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan psikotropika adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset bangsa yang paling berharga. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba dan psikotropika oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.858 korban⁵.

Penyebaran narkoba dan psikotropika menjadi makin mudah karena anak Sekolah Dasar (SD) juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Tidak jarang pengedar narkoba dan psikotropika menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkoba dan psikotropika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Berdasarkan fenomena tersebut, ternyata memperlihatkan betapa banyaknya perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Mengingat masyarakat pada saat ini dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dan psikotropika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba dan psikotropika yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan

⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN), Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, Jakarta, 2004, hal 9

tempat-tempat perkumpulan genk. Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian orang tua dan banyaknya masalah rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak - anak memilih narkoba dan psikotropika sebagai pelariaanya. saat ini para orang tua sangat longggar dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap generasi muda, karena sibuknya mencari nafkah untuk keluarga, sehingga mereka mudah terjerumus pada obat-obatan yang bisa merusak syaraf manusia tersebut. Para orang tua akhirnya merasa cemas dan takut bila anaknya para orang tua murid dan berharap agar ada komunikasi yang baik antara guru dan murid, khususnya soal perilaku anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai cirri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Dan karena kota Surabaya adalah sebagai Ibu Kota dari Jawa Timur, di Surabaya pasti terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan.

Namun terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba maupun Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkoba dan psikotropika yang disalahgunakan.

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pembedaan terhadap

anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁶

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

Tidak ada pengaturan tentang batasan umur pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana yang belum dewasa. Tetapi dalam pasal 4 undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur batasan umur dalam pengajuan anak ke persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “ PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

⁶ Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta, Djambatan, 2000, hal. 9

NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di PN Surabaya ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di PN Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran penanganan perkara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana mengenai narkotika dan psikotropika.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim PN Surabaya terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana mengenai narkoba dan psikotropika khususnya yang terjadi pada anak serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Narkotika

Di Indonesia, istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris, narcotics yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata narcosis dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membius. Arti narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.⁷

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa

⁷ Satgas Luhen Narkoba Mabes POLRI, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2001, hlm 3

menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).⁸

Sesuai dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari pengertian diatas hal yang sama dengan narkotika dan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat alamiah atau sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian narkotika dan psikotropika tidak disebutkan demikian. Narkotika dan psikotropika pengaruhnya tertuju pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas terhadap aktifitas mental dan perilaku. Seding pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.⁹

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hlm 9.

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 153.

1.5.2 Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.¹⁰

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika :

¹⁰ O.C. Kaligis, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan), Alumni, Bandung, 2002, hlm 254.

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.”

Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 37 Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Narkotika golongan II

Menurut pasal 2 ayat (2) huruf b, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidine dan methafone. Heroin

dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.¹¹ Putauw merupakan jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan.

Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

3. Narkoba golongan III

Narkoba golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkoba adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkoba ini adalah sama dengan narkoba golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu

¹¹ Ibid., hlm 253

ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

Perbedaan mendasar dari ketiga golongan narkotika ini adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I : berguna untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi dengan resiko ketergantungan sangat tinggi.
- b. Narkotika Golongan II : Berguna untuk pengobatan dan digunakan sebagai alternative pengobatan terakhir serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan resiko ketergantungan tinggi.
- c. Narkotika Golongan III : berguna untuk pengobatan, terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan resiko ketergantungan rendah.¹²

1.5.3 Pengertian Psikotropika

Adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

¹² Gatot Supramono, Op.Cit., hlm 218.

mental dan perilaku. Menurut Nanizar Zaman Joenoes, Psikotropika adalah zat atau bahan atau obat yang mempengaruhi psyche atau keadaan jiwa.

Keadaan tersebut seperti:

1. Keadaan jiwa diubah menjadi tenang, ada perasaan nyaman, tertidur.
2. Dalam hal lain pemakai menjadi gembira, hilang rasa sedih dan susah serta perasaan senang (euphoria).
3. Bahan atau obat yang memberikan halusinasi yaitu dimana pemakai melihat atau merasakan sesuatu lebih indah dari sebenarnya yang dihadapi.¹³

Zat atau obat ini baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikotropika. Dalam United Nation Conference for Adoption of Protokolon Psychotropic Substance disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan :

- a. Keadaan ketergantungan;
- b. Depresi dan stimulant susunan saraf pusat (SSP)
- c. Menyebabkan halusinasi;
- d. Menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood.¹⁴

¹³ Nanizar Zaman Joenoes, Masalah Penyalahgunaan Obat, Surabaya Intelektual Club, Surabaya, 1984, Hal 22

1.5.4 Penggolongan Psikotropika

Undang-undang Psikotropika No. 5 tahun 1997 pasal 2 ayat (2), membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 golongan, yaitu :

- a) Psikotropika Golongan I
- b) Psikotropika Golongan II
- c) Psikotropika Golongan III
- d) Psikotropika Golongan IV

Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut, karena yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Adapun penggolongan jenis psikotropika adalah sebagai berikut:

1. Psikotropika golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya Bromlafetamina, efisiklidina, etriptamia, katinona, psolosibina, rolisiklidina.

¹⁴ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika ,Dalam Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,2003, hlm 8.

2. Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antaralain, Amfetamina, deksamfetamina, fenetilina, fenmerazina, fensilikdina, levamfetamina, meklokualon, metamfetamina, rasemat, metakualon, metilfenidat, sekobarbita, zipeprol.

3. Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya amorbital, buprenorfina, butalbital, flunitrazepam, Katina, glutetimida, pentazosina, pentobarbital, siklobarbital.

4. Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Seperti Allobarbital, alprazolam, amfepramona, aminorex, benzfetamina,

bromazepam, brotizolam, diazepam, etinamat, kamazepam, lefetamina, nimetazepam, triazolam, vinilbital, dan lain-lain.¹⁵

1.5.6 Pengertian Anak

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungan sosial.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidakmampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kotrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶ Anak merupakan potensi sumber daya manusia di masa depan .

¹⁵ Gatot Supramono, op.cit., hlm 19-23

¹⁶ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, 2000, Hal 3

1.5.6.1 Pengertian anak menurut ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 angka 1 dan angka 2 perihal ketentuan umum adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 2

Anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana atau,
- b. anak yang melakukan tindakan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah ditulis sebagaimana hal diatas, maka apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika masih belum dewasa, maka yang menjadi acuan adalah undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

1.5.6.2 Pengertian anak menurut ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Undang – undang Perlindungan anak pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Maka dari itu, dalam hal pengenaan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa harus dibedakan.

1.5.7 Proses Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

15.8 Upaya Hukum

Upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan undang-undang.

Upaya hukum yang dapat ditempuh, KUHP membedakan upaya hukum menjadi dua, yaitu :

a. Upaya hukum biasa, upaya hukum biasa terdiri dari tiga bagian (di dalam KUHP hanya diatur mengenai kasasi dan banding), yaitu :

1. Verzet.

Verzet adalah perlawanan terhadap putusan diluar hadirnya terdakwa (verstek) yang hanya menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa. Verzet diajukan pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam waktu dan hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

2. Banding.

Banding adalah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

3. Kasasi.

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengertian pengadilan kasasi ialah Pengadilan memeriksa apakah judex fatie tidak salah dalam melaksanakan peradilan.

b. Upaya hukum luar biasa untuk upaya hukum luar biasa (istimewa) ada dua :

1. Rekes Sipil (Peninjauan Kembali).

Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata “Herziening”, M. H. Tirtaamijaya menjelaskan Herziening sebagai berikut : itu adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki sesuatu kealpaan hakim yang merugikan si terdakwa, kalau perbaikan itu dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.

2. Dender Verzet.

Dender Verzet terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. dasar hukumnya adalah 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/ pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). Denderverzet diajukan ke pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah secara yuridis sosiologis, yaitu meneliti perundang-undangan dan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah diatas.

Penelitian hukum sosilogis mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Empirical law research, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

1.6.2.1 Data primer yaitu berupa data berupa subyek hukum yang langsung sebagai sumber informasi, seperti panitera, pegawai pemerintah, tokoh masyarakat adat dan sebagainya¹⁷.

1.6.2.2 Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

1. Sumber Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
3. Sumber bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai tambahan pelengkap dari kedua bahan sebelumnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

¹⁷ Indrat Rini, *Handout Metodologi Penelitian Hukum*, FH UPN, 2007, h 17

1.6.3.1 Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian¹⁸.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surabaya dan mengumpulkan literatur-literatur hukum, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi lengkap.

Adapun prakteknya nanti penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pegawai dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.4 Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan

¹⁸ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Peneliti Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h 101

hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah data tersebut rampung, maka penulis menganalisisnya dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi-bagi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab Pertama, Pendahuluan. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menguraikan rumusan masalah yang pertama tentang pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, bab ini terdapat tiga subbab yang pertama mengenai Konsep Diversi dan Restorative Justice (sebuah tindakan untuk mengalihkan atau

menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana), yang kedua mengenai ketentuan hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan yang ketiga mengenai proses pemeriksaan dan peradilan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Bab Ketiga, menguraikan rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, bab ini terdapat dua subbab yang pertama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan analisis vonis rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika .

Bab Keempat, Berdasar uraian-uraian dalam bab dua dan bab tiga diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran dalam bab keempat sebagai penutup.

1.8 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Surabaya karena :

1. Surabaya ibu kota jawa timur dan merupakan kota Metropolis kedua setelah Jakarta.
2. Sebagai Ibu Kota dari Jawa Timur di Surabaya pasti terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan. Alasan-alasan tersebut yang menjadikan keinginan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya.